

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memiliki mata yang sehat merupakan salah satu karunia Tuhan yang paling berharga. Dengan terangnya pandangan mata, manusia memiliki kebahagiaan tersendiri. Menikmati dunia yang indah, menikmati aksesori alami dan kultur hasil rekayasa manusia maupun ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah tidak beruntungnya apabila seseorang manusia tidak memiliki dan tidak bisa menikmati sehatnya pandangan mata.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang manusia mengalami penurunan ketajaman penglihatan yang pada akhirnya menyebabkan kebutaan. Misalnya, faktor kecelakaan dan penyakit mata yang tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. Kebutuhan yang dialami seseorang ada yang dapat dipulihkan ada yang tidak dapat dipulihkan. Apabila kebutaan seseorang terjadi karena gangguan retina atau selaput dan kelainan syaraf penglihatan mata, tidak mungkin memperbaikinya untuk mendapatkan penglihatan normal kembali. Jenis kebutaan yang dapat dipulihkan kembali penglihatannya ialah seperti buta katarak atau kerusakan selaput bening mata dengan jalan operasi,. Pemulihan penglihatan pada penderita dengan kerusakan selaput bening mata dapat dilakukan dengan jalan Transplantasi atau pencangkokkan kornea mata. Transplantasi menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang

bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomi serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia Pasal 1 ayat (5) “Rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat atau tubuh dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tak berfungsi dengan baik”.¹ Sedangkan menurut Undang –undang No. 2 Tahun 1992 tentang kesehatan Transplantasi adalah “Rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ-organ dan atau jaringan yang tidak berfungsi dengan baik”.²

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa mengenai Transplantasi telah diatur dalam hukum positif nasional, namun perlu juga diketahui bahwa operasi Transplantasi bukanlah suatu perbuatan yang dilarang agama. Bahkan agama islam telah memberikan pandangannya untuk meyakinkan masyarakat lewat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 13 Juni 1978 ‘Seseorang yang semasa hidupnya berwasiat akan menghibahkan Kornea Matanya sesudah wafat dengan diketahui dan disetujui oleh ahli warisnya maka hal tersebut dapat dilaksanakan dan harus dilakukan oleh ahli bedah”.

Dalam usaha melakukan operasi Transplantasi atau pencangkokkan kornea diperlukan suatu kornea mata orang lain, yang mana dengan tulus

¹ Peraturan pemerintah No. 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomi serta Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia.

² Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

ikhlas, tanpa imbalan apapun bersedia menyumbangkan Kornea Matanya apabila ia meninggal kelak. Orang ini sering kita kenal dengan istilah pendonor mata. Perlu diketahui bahwa yang diambil dari calon Pendonor Mata yang akan dioperasi bukan bola matanya, tetapi hanya kornea matanya saja, kornea tidak hidup dari darah tetapi dari air yang ada di mata, karena orang yang telah meninggal dunia kornea matanya dapat dimanfaatkan untuk dicangkokkan kepada tuna netra dalam waktu paling lama 6 jam.³

Cara untuk menjadi donor mata adalah dengan cara mengisi surat pernyataan sebagai calon donor mata. Setelah calon donor mata menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh ahli waris dan dua orang saksi. Kemudian setelah diproses secara administratif, lalu kepada calon pendonor akan diberikan kartu anggota donor mata oleh Bank Mata, Bank Mata inilah yang akan mengurus dan menangani sampai terlaksananya pengambilan dan pencangkokkan kornea mata dari pendonor mata kedalam tuna netra sebagai Resepian, juga mengirim surat kepada lembaga-lembaga yang memerlukan kornea Mata⁴.

Masalah pengambilan dan pencangkokkan organ tubuh manusia khususnya pengambilan dan pencangkokkan mata sekarang bukanlah masalah yang asing lagi, karena berkat kemajuan dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat sehingga secara langsung pula akan berpengaruh pada masyarakat yang kompleks dengan perkembangan

³ *Dr. H. Rahman, DSM, DSKP*, "Media teknis donor mata" Media kornea No. 10/11 Tahun 8, edisi Oktober/November, hal 12.

⁴ *Drs. Sri Raharjo*, wawancara sekretaris Bank Mata (Surakarta, 1-3-2006)

jaman. Untuk menuntaskan usaha dalam membantu memulihkan penglihatan tunanetra salah satunya upayanya yakni menghimpun calon donor mata sebanyak-banyaknya, tetapi hasil yang didapat masih jauh dengan apa yang kita harapkan. Permasalahannya masih sedikit dari masyarakat yang Belum tahu dan takut untuk menjadi donor mata dan resipien. Hal ini disebabkan karena :

1. Masyarakat indonesia masih belum tahu bahwa menjadi donor mata tidak bertentangan dengan ajaran agama
2. Masyarakat takut menjadi donor maupun resipien mata, karena mengira akan mengalami dampak negatifnya, misalnya arwah donor bergentayangan mencari dan mengganggu resipien untuk mengambil kembali matanya.
3. Keluarga atau ahli waris takut membayangkan operasi pengangkatan kornea pada jenazah calon donor mata.
4. Masyarakat belum tahu kornea mata yang diberikan kepada resipien secara cuma-cuma.
5. Masyarakat takut ada efek camping dari operasi pencangkokkan kornea.
6. Masyarakat belum tahu bagaimana dan kemana melaporkan keinginan menjadi pendonor mata.

Pelaksanaan operasi pengambilan kornea untuk kepentingan Transplantasi dilakukan oleh tenaga ahli yaitu para dokter ahli mata dari pihak Bank Mata. Pelaksanaan ini dilakukan oleh tenaga ahli, karena

mengenai hal tersebut diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, yang menyatakan bahwa “ barang siapa yang tanpa keahliannya dan kewenangan dengan melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atas pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)”⁵. Diatas telah diutarakan bahwa untuk dapat diambil dan didonorkan matanya seseorang harus menjadi anggota donor mata lebih dahulu sebagai calon donor mata pada Bank Mata cabang Surakarta, kemudian untuk terlaksananya proses dari pengambilan mata sampai dengan pencangkokkan atau Transplantasi mata, maka seseorang pendonor mata harus mengadakan perjanjian dalam suatu surat yang isinya mengatakan bahwa seseorang pendonor mata memberikan kuasanya kepada Bank Mata cabang Surakarta melalui pengurusnya untuk melaksanakan pengambilan dan pencangkokkan matanya setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan setelah pendonor mata meninggal dunia. Tentu saja perjanjian ini dibuat semasa calon pendonor masih hidup. Adanya pengaturan tentang Transplantasi kornea mata dimaksudkan agar jika suatu saat terjadi hal-hal menghambat yang berkaitan dengan Transplantasi tersebut maka telah ada perjanjian yang mengaturnya agar mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian hukum baik bagi pendonor maupun Bank Mata. Dengan harapan pelaksanaan Transplantasi

⁵ Undang-undang No. 2. Tahun. 1992. Tentang kesehatan.

dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan diketahui oleh keluarga pendonor mata serta menghindari penjualan Kornea mata secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal perjanjian yang dilakukan antara calon pendonor dengan Bank Mata ini termasuk dalam perjanjian pemberi kuasa, karena dalam perjanjian Transplantasi kornea mata, calon pendonor memberikan kuasanya kepada Bank Mata untuk melakukan pengambilan kornea matanya dan Bank Mata menjalankan perbuatan yang dikuasakannya tersebut atas nama pendonor. Perjanjian pemberi kuasa menurut pasal 1792 KUHP Perdata adalah suatu perjanjian dengan nama seseorang dengan memberikan kekuasaannya atau wewenangnya kepada orang lain, yang menerima untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pada dasarnya bentuk suatu perjanjian itu bebas, perjanjian tidak mengikat pada bentuk tertentu, dapat tertulis maupun tidak tertulis⁶. Dengan demikian jelaslah bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum. Karena di setiap perjanjian harus ada dua belah pihak atau bahkan lebih yang saling berhadapan maka dalam perjanjian Transplantasi kornea mata dapat disebut antara lain :

1. Pihak pertama, yaitu Bank Mata Cabang Surakarta sebagai yang diberi kuasa dalam hal ini bisa diwakili oleh ketua atau sekretarisnya.

⁶ R. Subekti. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta, 1990.

2. Pihak kedua, yaitu calon pendonor mata sebagai pihak pemberi kuasa.
3. Pihak ketiga, dalam hal ini adalah para saksi. Para saksi dimaksud biasanya keluarga dekat yang masih mempunyai hubungan darah atau Ahli Waris dari calon Pendonor Mata .

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa hubungan hukum pendonor mata dengan Bank Mata merupakan masalah penting dan menarik untuk dibahas karena proses terjadinya perjanjian Transplantasi, bentuk perjanjian, pelaksanaan prestasinya sebagai isi dari perjanjian, hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang mengikatkan diri serta hambatan-hambatan yang timbul dalam perjanjian mempunyai aspek-aspek hukum faktualis yang dapat dibandingkan dengan aspek-aspek hukum normatif. sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN TRANSPLANTASI KORNEA MATA ANTARA PENDONOR MATA DENGAN BANK MATA (STUDI KASUS DI BANK MATA CABANG SURAKARTA)”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Oleh karena ruang lingkup perjanjian sangat luas, sedangkan kemampuan berpikir, sarana serta waktu yang terbatas juga agar penelitian

ini menjadi lebih terarah dan sekaligus untuk menghindarkan kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang hendak diteliti maka perlu adanya disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang masalah, dimana perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses perjanjian Transplantasi kornea mata antara Pendonor Mata dengan Bank Mata cabang Surakarta.
2. Bagaimana hak dan kewajiban antara Pendonor Mata dengan Bank Mata Cabang Surakarta.
3. Bagaimana tanggung jawab dan kapan berakhirnya perjanjian Transplantasi kornea mata antara Pendonor Mata dengan Bank Mata Cabang Surakarta.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui proses perjanjian Transplantasi antara pendonor mata dengan Bank Mata Cabang Surakarta.
2. Mengetahui hak dan kewajiban pendonor mata dan Bank Mata Cabang Surakarta.
3. Mengetahui kapan berakhirnya perjanjian Transplantasi antara pendonor mata dengan Bank Mata Cabang Surakarta dan tanggung jawab kedua belah pihak.

C. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya, Hukum Perdata tentang pelaksanaan perjanjian transplantasi kornea antara pendonor dengan Bank Mata.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ilmu hukum perdata dalam proses pelaksanaan perjanjian transplantasi kornea antara pendonor dengan Bank Mata.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat yang ingin menjadi pendonor mata ataupun resepien, serta diharapkan pelaksanaan perjanjian pemberi kuasa dapat berjalan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

D. METODE PENELITIAN

Dengan suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian dan agar data yang diperoleh lengkap, relevan,

akurat, dan realible, diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan (depenable) dalam penlitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini metode yang digunakan disini adalah pendekatan yang bersifat normatif, yaitu merupakan suatu pendekatan yang mempergunakan aspek-aspek atau norma-norma hukum, dalam perjanjian transplantasi kornea mata antara pendonor dengan Bank Mata, sehingga dapat diketahui legalitas dalam perjanjian transplantasi kornea mata tersebut diatas.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistimatis dan menyeluruh tentang pelaksanaan perjanjian transplantasi kornea antara pendonor dengan Bank Mata.

3. Bahan Hukum Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan penelitian teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum. Dalam penelitian kepustakaan di kelompokkan menjadi 3 yaitu :

a.1. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- c. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1992 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomi serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh.

a.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum terdiri dari buku-buku karangan ilmiah yang membahas tentang Perjanjian Transplantasi Kornea Mata antara Pendonor Mata dengan Bank Mata.

a.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Penelitian lapangan

b.1 Lokasi Penelitian : Bank Mata cabang Surakarta

b.2 Subjek Penelitian : 1.Pendonor kornea Mata

2.Pengurus Bank Mata Cabang

Surakarta.

4. Metode Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Merupakan data-data sekunder yang diperoleh melalui Bahan-bahan hukum yang ada seperti bahan hukum Primer, Sekunder, Tersier.

b. Penelitian lapangan

Merupakan data yang merupakan kenyataan-kenyataan yang berlaku dan diperoleh dalam praktek di lapangan. Data-data tersebut diperoleh melalui:

1. Observasi (pengamatan)

Yaitu melakukan pengamatan langsung pada obyeknya.

Dalam hal ini yang akan dijadikan sebagai obyek pengamatan dalam penelitian ini adalah aktifitas kesekretariatan Bank Mata cabang Surakarta juga calon pendonor mata.

2. Interview

Merupakan suatu bentuk tanya jawab lisan bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari yang menjadi objek penelitian.

3. Kuisioner

Yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk mendapatkan data dari populasi yang terdiri dari beraneka macam golongan atau kelompok yang tersebar.

4. Teknik Pengambilan sample

Untuk menentukan sample, disini penulis menggunakan teknik non random sampling secara purposif, yaitu proses pengambilan sampling dengan pembatasan sample hanya pada individu tertentu yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriterianya sebagai berikut :

1. Orang yang pernah menjadi pendonor mata.
2. Pendonor Mata yang melakukan donor mata di Bank Mata Cabang Surakarta.

Jadi tidak semua individu diambil sebagai simple hanya terbatas pada individu yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

5. Analisis data

Mengingat jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif maka data yang dihasilkan adalah data deskriptif analistis, yaitu data data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada. Kemudian dibandingkan dengan data-data yang dinyatakan oleh responden berupa tulisan maupun secara lisan serta perilaku responden di

lapangan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif artinya hasil analisis diberikan dalam bentuk uraian mengenai gambaran pelaksanaan perjanjian transplantasi kornea mata antara pendonor mata dengan Bank Mata cabang Surakarta.

E. SISTIMATIKA SKRIPSI

Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan sebagai gambaran tentang penulisan ilmiah ini secara keseluruhan, artinya pada sub bab ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan isi yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Perumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pihak-pihak, objek dan hubungannya dalam perjanjian

1. Pengertian Kornea Mata
2. Pengertian Pendoron Mata
3. Pengertian Bank Mata
4. Pengertian Transplantasi Kornea Mata
5. Hubungan Pendoron mata dengan Bank Mata dalam Perjanjian Transplantasi Kornea Mata
6. Pengertian Perjanjian Transplantasi antara pendonor dengan Bank Mata
7. Hak dan Kewajiban pendonor mata dan Bank Mata
8. Tanggung Jawab dan kapan berakhirnya perjanjian Transplantasi Kornea antara Pendoron mata dengan Bank Mata Cabang Surakarta

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses perjanjian pemberi kuasa transplantasi kornea mata
2. Hak dan kewajiban antara pendonor mata dengan Bank Mata cabang Surakarta
3. Tanggung jawab dan berakhirnya perjanjian pemberi kuasa transplantasi kornea antara pendonor dengan Bank Mata cabang Surakarta.

B. Pembahasan

1. Proses perjanjian pemberi kuasa transplantasi kornea mata
2. Hak dan kewajiban antara pendonor mata dengan Bank Mata cabang Surakarta
3. Tanggung jawab dan berakhirnya perjanjian pemberi kuasa transplantasi kornea antara pendonor dengan Bank Mata cabang Surakarta.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran